

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan hal yang penting di lakukan pada setiap negara. Melalui pembangunan ekonomi ini kemakmuran, taraf hidup dan lapangan pekerja bisa menjadi lebih baik, sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi (Harahap, 2018). Menurut (Jhingan, 2013) mengatakan bahwa istilah pembangunan ekonomi ini di gunakan secara bergantian dan saling berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, dan kemajuan ekonomi, lalu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi ini digunakan untuk beberapa negara, untuk negara berkembang menggunakan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di gunakan untuk negara maju.

Pembangunan ekonomi di ukur menggunakan kenaikan pendapatan nasional riil dalam jangka panjang, pendapatan nasional riil adalah output barang jadi dan jasa dari negara tersebut, suatu negara di katakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik apabila GDP riil negara tersebut meningkat di mana kemudian hal tersebut menjadi indikator untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pembangunan ekonomi yang baik maka kemiskinan akan semakin berkurang karena terdapat investasi, otomatis lapangan pekerjaan akan semakin bertambah dan jumlah pengangguran akan berkurang, lalu dengan adanya pertumbuhan ekonomi sumber daya manusia

akan semakin membaik karena sarana pendidikan yang maju sebab adanya pembangunan ekonomi yang baik, dengan adanya pertumbuhan ekonomi tingkat PDRB akan semakin meningkat dan upah minimum akan naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dan keberhasilan dari pembangunan ekonomi adalah berkurangnya angka kemiskinan di suatu negara (Huda, 2017).

Kemiskinan adalah permasalahan yang selalu di hadapi semua negara dengan berbagai macam latar belakang, kemiskinan ini juga menjadi persoalan yang mendasar dan menjadi pusat perhatian (Maulana, 2022). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang dialami oleh masyarakat yang kurang beruntung karena disebabkan berbagai hal, baik dari diri pribadi maupun dari faktor luar individu yang mengakibatkan mereka tidak dapat mampu untuk mengakses sistem sumber yang ada di sekitarnya (Trisnu & Sudiana, 2019).

Kemiskinan di Indonesia menjadi masalah yang belum dapat di pecahkan dari dahulu sampai sekarang, terdapat banyak usaha yang sudah di lakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi dan mengurangi angka tingkat kemiskinan, masalah kemiskinan tidak hanya disebabkan karena kecenderungan angka kemiskinan yang meningkat, tapi karena konsekuensi yang meliputi ruang lingkup ekonomi sosial. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan harus diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi, baik jangka panjang maupun jangka pendek. (Tabela *et al.*, 2022)

Kemiskinan menurut (Dube, 2019) berdasarkan faktor individu kemiskinan diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memanfaatkan

pengetahuan, pendidikan, dan kerja kerasnya secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan dalam menghindari kemiskinan. Teori ini mengacu pada nilai dan kepercayaan negara Amerika dengan sistem pasar bebarnya yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja keras semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan pokok dapat terpenuhi karena bergantung pada seberapa keras masyarakat dalam berusaha sehingga masyarakat yang tidak mau berusaha akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Indonesia adalah negara berkembang masalah kemiskinan merupakan masalah yang penting dan pokok dalam upaya pembangunannya. Keberagaman pandangan tentang kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensi, fenomena ini membuat pengukuran kemiskinan menjadi tidak mudah. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,50%, naik menjadi 7,53% pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2022 sebesar 12,29%, naik menjadi 12,36% pada September 2022. (Badan Pusat Statistik, 2022).

Di Pulau Jawa terdapat 6 provinsi, antara lain Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, dan Banten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam hal jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah menempati Provinsi termiskin Ke-2 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 3.831.440 jiwa dengan presentase sebesar 10,77% setelah Provinsi

Jawa Timur dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.181.290 jiwa dengan presentase sebesar 13,65%.



Gambar 1.1 Presentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah
Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2022)

Grafik di atas menunjukkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun yaitu dari tahun 2017-2022 yang mana pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu mencapai angka 1,69%. Pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan angka yang cukup baik sebesar 0,53%. Selanjutnya pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan kembali yang cukup tinggi di mana menyentuh angka 0,61% yang di mana terjadi karna adanya Pandemi *COVID-19* yang sempat memberikan penekanan pada perekonomian negara dalam segala sektor. Kemudian pada tahun 2020-2021 masih mengalami kenaikan sebesar 0,38% yang di sebabkan karena hal yang sama karena Pandemi *COVID-19*, memang pandemi ini sangat memberikan tekanan pada sektor perekonomian masyarakat dan juga negara, di mana semua sektor terpaksa di hentikan dan di tutup karena tidak di perbolehkan ada nya interaksi antar masyarakat dan

antar negara, bukan hanya Negara Indonesia saja yang terdampak tetapi seluruh dunia juga mengalami hal ini, maka dari itu hal ini menjadikan inflasi besar-besaran seluruh dunia, kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 10,93%.

Provinsi Jawa Tengah sendiri memiliki 29 kabupaten dan 6 kota yang Ibukotanya berada di Semarang, dari ke 29 kabupaten dan 6 kota ini banyak sekali terdapat masyarakat miskin yang upah minimumnya rendah, tingkat pendidikannya juga rendah, dan PDRB nya rendah, banyak upaya sudah digunakan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah seperti pembangunan infrastruktur pada setiap kabupaten, peningkatan upah minimum buruh pada setiap tahunnya, bantuan kebutuhan primer dan sekunder, sekolah gratis, upaya peningkatan ukm pada setiap tahunnya yang mengadakan even bashar UMKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan PDRB untuk kabupaten, dan masih banyak lagi upaya yang di lakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan, namun semua yang di lakukan pemerintah tidak membuahkan hasil, angka kemiskinan terus saja tinggi dan masyarakat miskin terus saja bertambah. Berikut di bawah ini adalah kabupaten termiskin di Jawa Tengah:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah (jiwa)

No	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata	Rank
1.	Kabupaten Cilacap	238.300	193.200	185.200	198.600	201.710	190.960	201.328	5
2.	Kabupaten Banyumas	283.200	226.200	211.600	225.840	232.910	220.470	233.370	2
3.	Kabupaten Purbalingga	171.900	144.200	140.100	149.480	153.080	145.330	150.682	8
4.	Kabupaten Banjarnegara	156.800	141.700	136.100	144.950	150.190	141.250	145.165	9
5.	Kabupaten Kebumeh	233.400	208.700	201.300	211.090	212.920	196.160	210.595	3
6.	Kabupaten Purworejo	98.600	83.500	82.200	84.790	88.800	82.640	86.755	14
7.	Kabupaten Wonosobo	159.200	138.300	131.300	137.630	139.670	128.110	139.035	10
8.	Kabupaten Klaten	165.000	151.700	144.100	151.830	158.230	144.870	152.622	7
9.	Kabupaten Sragen	124.000	116.400	113.800	119.380	122.910	115.140	118.605	11
10.	Kabupaten Grobogan	181.000	168.700	161.900	172.260	175.720	163.200	170.463	6
11.	Kabupaten Blora	111.900	102.500	97.900	103.720	107.050	99.830	103.818	12
12.	Kabupaten Rembang	115.200	97.400	95.300	100.080	101.400	94.560	100.657	13
13.	Kabupaten Pemalang	225.000	208.300	200.700	209.030	215.080	195.840	208.992	4
14.	Kabupaten Brebes	343.500	309.200	293.200	308.780	314.950	290.660	310.048	1

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2022)

Dari tabel di atas menunjukan 14 kabupaten termiskin di provinsi Jawa Tengah yang mewakili dari 29 kabupaten dan 6 kota, dalam penelitian ini mengambil 5 kabupaten yang memiliki presentase jumlah penduduk miskin terbanyak di provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Brebes pada tahun 2017 memiliki jumlah presentase penduduk miskin sebesar 19,14% yang di mana jumlah ini sangatlah tinggi di bandingkan dengan kabupaten yang lainnya. Kemudian pada tahun 2018 Brebes memiliki jumlah presentase penduduk miskin sebesar 17,17% yang di mana dapat kita lihat mengalami penurunan sebesar 1,97% jika di bandingkan dengan tahun lalu. Selanjutnya pada tahun 2019 Brebes memiliki jumlah presentase penduduk miskin 16,22% yang di mana dapat kita lihat mengalami penurunan sebesar 0,95%. Pada tahun 2020 jumlah presentase penduduk miskin Kabupaten Brebes mengalami peningkatan menjadi 17,03% dengan peningkatan sebesar 0,81%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan presentase penduduk miskin

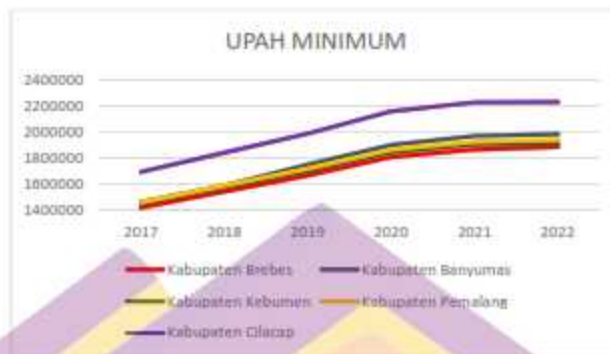
menjadi 17,43% dengan kenaikan sebesar 0,4%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan presentase penduduk miskin menjadi 16,05% dengan penurunan sebesar 1,38%.

Kabupaten Banyumas pada tahun 2017-2022 jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin semakin menurun seiring dengan perkembangan zaman, pada tahun 2017 memiliki presentase penduduk miskin sebesar 17,05%, pada tahun 2022 tercatat 12,84% presentase penduduk miskin. Kemudian di ikuti oleh Kabupaten Kebumen yang memiliki presentase penduduk miskin sebesar 19,60% pada tahun 2017, dan kemudian mengalami penurunan presentase jumlah penduduk miskin yang baik pada tahun 2022 yang di mana mencapai 16,41%. Kabupaten Pemalang memiliki presentase jumlah penduduk miskin sebanyak 12,61% pada tahun 2017, dan kemudian mengalami penurunan yang baik pada tahun 2022 yang di mana mencapai presentase penduduk miskin sebesar 9,67%. Selanjutnya adalah Kabupaten Cilacap yang di mana memiliki jumlah presentase penduduk miskin sebesar 13,94% pada tahun 2017, dan kemudian mengalami penurunan yang baik pada tahun 2022 yang di mana presentase penduduk miskin sebesar 11,02%.

Upah minimum dibuat untuk memberikan kesejahteraan masyarakat agar dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dengan bekerja namun upah minimum di Provinsi Jawa Tengah tidak merata dan terjadi ketimpangan antara kabupaten yang satu dengan kabupaten lainnya dalam hal besar gaji. Setiap kabupaten memiliki tingkat upah minimum yang berbeda dan tidak

sesuai dengan upah minimum di provinsi, terlebih lagi harga bahan pokok dan kebutuhan semakin meningkat terus pada setiap harinya. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan solusi agar masyarakat bisa mencukupi kebutuhannya dan memperkecil angka kemiskinan. Dalam hal ini hasil analisis dari (Alifah & Imaningsih, 2016) menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, semakin tinggi tingkat upah minimum maka akan mengalami kenaikan juga pada pendapatan masyarakat.

Upah minimum menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, timbulnya kemiskinan dikarenakan terjadinya peningkatan harga pangan dan keperluan sekunder yang di mana sangat di butuhkan oleh manusia dalam meneruskan hidup dan keberlangsungan hidup dalam lingkungan sosial, meningkatnya upah minimum akan berpengaruh terhadap menurunkan permintaan tenaga kerja, sedangkan dari pihak tenaga kerja upah adalah bayar gaji atau hasil yang seharusnya diterima sebagai balas jasa dari waktu dan tenaga.



Gambar 1.2 Grafik Upah Minimum Kabupaten Brebes, Pemalang, Banyumas, Cilacap, Kebumen

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2022)

Dari grafik di atas dapat kita ketahui bahwa tingkat upah minimum Tahun 2017-2022 dari Kabupaten Brebes, Banyumas, Kebumen, Pemalang, Cilacap selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Meskipun tingkat upah minimum Kabupaten Kabupaten Brebes, Banyumas, Kebumen, Pemalang, Cilacap mengalami peningkatan di setiap tahunnya, penetapan tingkat upah minimum di 5 (lima) kabupaten tersebut masih tergolong rendah di karenakan tingkat upah minimum yang di tetapkan masih di bawah kebutuhan hidup layak (KHL) di Provinsi Jawa Tengah.

Tingkat pendidikan berhubungan dengan pengembangan pengetahuan, keahlian, serta keterampilan seseorang atau masyarakat dalam proses pembangunan, pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat upah yang di dapat karena tingkat pendidikan mempengaruhi profesi seseorang, yang di mana dalam hal kerja upah yang di dapat berbeda-beda tergantung dengan keahlian, tingkat pendidikan, dan pengalaman maka dari itu pendidikan

berpengaruh tinggi terhadap tingkat kemiskinan masyarakat, seperti pendapat dari (Tabela *et al.*, 2022) mengatakan bahwa Pendidikan berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi, maka pendidikan sebagai modal manusia dalam mempertahankan hidup.

Tingkat pendidikan pada penelitian ini menggunakan data rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah yang di mana menggunakan indikator Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas yang masih bersekolah dan telah menamatkan pendidikan menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan. Terdapat pula data yang menjelaskan seberapa banyak masyarakat yang telah menamatkan pendidikan dari umur 5 tahun ke atas.

Tabel 1.2 Persentase Penduduk yang masih bersekolah dan telah menamatkan pendidikan

Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas yang masih bersekolah dan telah menamatkan pendidikan menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan (Persen)					
Kabupaten	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA	Diploma I s.d Universitas	Jumlah yang Masih Sekolah
Kab. Brebes	11.68	4.95	3.84	1.58	22.05
Kab. Kebumen	12.31	4.87	5.28	1.07	23.53
Kab. Banyumas	11.25	3.95	4.79	1.79	21.78
Kab. Pemasang	12.11	5.16	3.81	1.20	22.28
Kab. Cilacap	10.78	5.25	4.50	0.93	21.46

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2021)

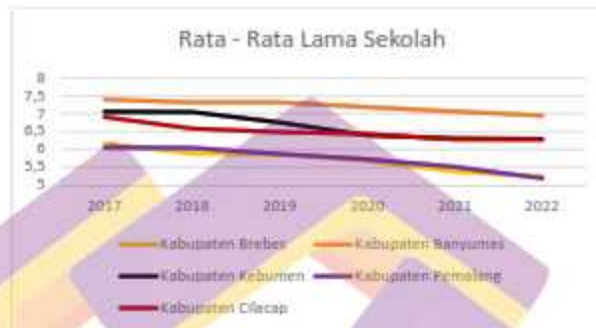
Jadi dapat di lihat pada tabel Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas yang masih bersekolah menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan (Persen) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pada Kabupaten yang memiliki presentase penduduk

yang telah menamatkan pendidikan perguruan tinggi (Diploma I s.d Universitas) terbanyak adalah Kabupaten Banyumas dengan tingkat presentase sebesar 1.79%, dan Kabupaten yang memiliki tingkat presentase pendidikan terendah pada perguruan tinggi (Diploma I s.d Universitas) adalah Kabupaten Cilacap dengan presentase penduduk miskin sebesar 0.93%.

Tingkat pendidikan dan kemiskinan selalu beriringan, karena masyarakat bisa bersekolah dengan jenjang yang semakin tinggi di karenakan taraf hidup yang tinggi pula, maka dari itu masyarakat yang mempunyai uang akan bisa bersekolah setinggi mungkin dan begitu pula sebaliknya masyarakat yang tidak punya uang cukup maka akan tidak dapat bersekolah tinggi di karenakan tekanan kebutuhan yang terus meningkat pada setiap tahunnya. Penelitian (Sam, 2023) yang membahas tentang pengaruh pendidikan terhadap tingkat penduduk miskin mengemukakan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan, yang artinya apabila tingkat pendidikan naik maka kemiskinan akan turun.

Selain itu tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap semakin tingginya tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, tingkat pendidikan yang rendah akan berpengaruh terhadap rendahnya tingkat ketrampilan, wawasan, dan pengetahuan dan akan berdampak kepada kemiskinan dan pengangguran yang terus meningkat, karena dengan adanya tingkat pendidikan yang rendah dan pergantian zaman pada setiap tahunnya, maka SDM yang berpendidikan rendah akan tergantikan dengan SDM yang berpendidikan tinggi, dan kesempatan kerja untuk SDM yang berpendidikan

rendah akan sangat kecil kemungkinannya untuk mendapatkan pekerjaan yang di inginkan.



Gambar 1.3 Grafik Rata - Rata Lama Sekolah Kabupaten Brebes, Pemalang, Banyumas, Cilacap, Kebumen
Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2022)

Dari grafik di atas dapat kita lihat Tingkat Pendidikan pada 5 kabupaten termiskin di Jawa Tengah, dapat kita lihat juga pada grafik dan tabel di atas tingkat ke 5 (lima) Kabupaten tersebut mengalami penurunan pada setiap tahunnya yang di mana setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang di mana setiap tahunnya taraf tingkat pendidikan di Indonesia semakin meningkat. Kabupaten Brebes pada tahun 2017 sampai dengan 2022 terus mengalami penurunan tingkat pendidikan yang di mana pada 2017 mempunyai tingkat rata-rata lama sekolah sebesar 6,17% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yang terus anjlok yaitu menginjak angka sebesar 5,24%. Kemudian pada Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 memiliki presentase tingkat pendidikan sebesar 7,39% yang di mana terus mengalami penurunan sampai dengan 2022 sebesar 6,94%. Kabupaten Kebumen juga mengalami tingkat penurunan yang terus menerus, tercatat pada tahun 2017

memiliki presentase tingkat pendidikan sebesar 7,05% dan pada tahun 2022 sebesar 6,29%. Kabupaten Peralang juga masih sama mengalami penurunan terus menerus pada setiap tahunnya yang mana pada 2017 memiliki angka tingkat pendidikan sebesar 6,05% dan pada tahun 2022 sebesar 5,19%. Kabupaten Cilacap pada tahun 2017 mempunyai presentase tingkat pendidikan sebesar 6,9% dan pada tahun 2022 sebesar 6,27 % yang di mana juga mengalami penurunan terus pada setiap tahunnya.

Pada tabel di atas dapat di lihat tingkat pendidikan pada setiap kabupatennya mengalami penurunan terus menerus pada setiap kabupaten, hal ini harus sangat di perhatikan oleh pemerintah setempat agar kasus putus sekolah tidak marak terjadi pada setiap kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. indikasi permasalahan dari semakin turunnya tingkat pendidikan pada setiap kabupaten adalah karna tingkat kemiskinan pada suatu wilayah itu sendiri, dengan adanya masyarakat yang miskin akan membuat tingkat pendidikan yang rendah di karenakan kekurangan dana dan memilih tidak bersekolah untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan pada setiap harinya.

Semua daerah menginginkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerahnya meningkat setiap tahunnya. PDRB yang tinggi menandakan keberhasilan suatu daerah dalam melakukan pembangunan ekonomi, hal itu dikarenakan PDRB yang tinggi menunjukkan produksi yang tinggi akibat banyaknya permintaan masyarakat akan barang dan jasa, permintaan tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat bertambah karena pendapatan yang bertambah, bertambahnya pendapatan masyarakat

menunjukkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik sehingga masyarakat dapat keluar dari kondisi kemiskinan.



Gambar 1.4 Tingkat Produk Domestik Ragional Bruto Kabupaten Brebes, Pemalang, Banyumas, Cilacap, Kebumen
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2022)

Dari grafik di atas, Kabupaten Brebes, Banyumas, Kebumen, dan Pemalang memiliki tingkat PDRB yang tidak terpaut jauh, namun hanya Kabupaten Cilacap saja yang memiliki tingkat PDRB yang lebih tinggi di bandingkan keempat kabupaten lainnya. Kabupaten Brebes pada tahun 2017 memiliki presentase Tingkat PDRB sebesar 29.509.206,81 rupiah, dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 31.060.106,12 rupiah dengan kenaikan sebesar 1.550.899,31 rupiah . Pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali lebih besar mencapai 32.847.862,67 rupiah dengan kenaikan sebesar 1.787.756,55 rupiah, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup besar sebesar 32.693.080,65 rupiah dengan presentase penurunan sebesar 154.782,02 rupiah, kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat tinggi dengan nilai sebesar 33.533.328,43 rupiah dengan presentase

kenaikan sebesar 840.247,78 rupiah, dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2022 dengan angka 35.414.759,35 rupiah dengan presentase kenaikan sebesar 1.881.430,92 rupiah.

Kabupaten Banyumas, pada tahun 2017 tingkat PDRB sebesar 35.147.313,3 rupiah kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 37.414.500,58 rupiah dengan presentase kenaikan sebesar 2.267.187,28 rupiah, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali sebesar 39.779.320,86 rupiah dengan presentase peningkatan sebesar 2.364.820,28 rupiah. Tahun 2020 Kabupaten Cilacap mengalami penurunan PDRB sebesar 39.121.623,57 rupiah yang di mana mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan presentasi penurunan sebesar 657.697,29 rupiah, selanjutnya pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup baik yaitu sebesar 40.686.808,02 rupiah dengan presentase kenaikan sebesar 1.565.184,45 rupiah. Kemudian pada tahun 2022 mengalami sedikit kenaikan menjadi 43.069.504,38 rupiah dengan kenaikan sebesar 2.382.696,36 rupiah.

Kabupaten Kebumen, pada tahun 2017 PRDB sebesar 17.794.789,30 rupiah kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup baik yaitu sebesar 18.778.048,50 rupaiah dengan peningkatan sebesar 983.259,2 rupiah, dan pada 2019 mengalami kenaikan kembali sebesar 19.815.062,62 rupiah dengan peningkatan sebesar 1.037.014,12 rupiah, kemudian pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan sebesar 19.527.664,95 rupiah dengan presentasi peningkatan sebesar 287.397,67 rupiah, tetapi pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan terus menerus yang mana pada tahun 2022

mempunyai tingkat PDRB sebesar 21.425.793,42 ribu dengan peningkatan sebesar 1.898.128,47 ribu.

Kabupaten Pemalang, pada tahun 2017 mempunyai nilai tingkat PDRB sebesar 16.336.984,00 rupiah kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 17.265.888,82 rupiah dengan presentase peningkatan sebesar 928.904,82 rupiah pada tahun 2019 yang mengalami kenaikan tingkat PDRB yang cukup baik yaitu sebesar 18.267.199,78 rupiah dengan peningkatan sebesar 1.001.310,96 rupiah, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu menjadi 18.155.597,42 rupiah dengan penurunan sebesar 111.602,36 rupiah, yang di mana di alami oleh beberapa kabupaten lainnya di Jawa Tengah, kemudian pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan terus menerus dengan nilai tingkat PDRB sebesar 19.895.335,20 rupiah pada tahun 2022 dengan peningkatan sebesar 1.739.737,78 rupiah.

Kabupaten Cilacap, kabupaten ini memiliki tingkat nilai PDRB yang lebih tinggi di bandingkan dengan dengan ke empat kabupaten di atas, pada tahun 2017 memiliki nilai PDRB sebesar 95.254.586,70 rupiah, dan pada tahun 2018 mempunyai nilai PDRB sebesar 98.100.568,17 rupiah dengan peningkatan sebesar 2.845.981,47 rupiah, kemudian pada tahun 2019 Kabupaten Cilacap memiliki nilai PDRB yang paling tinggi di bandingkan tahun sebelum nya yaitu mencapai nilai sebesar 100.327.298,90 rupiah dengan peningkatan sebesar 2.226.730,73 rupiah, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis seperti kabupaten yang lainnya yaitu sebesar 90.011.584,10 rupiah dengan penurunan sebesar 10.315.714,8

rupiah, dan pada tahun 2021 dan 2022 terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 96.657.548,20 rupiah pada tahun 2022 dengan peningkatan sebesar 6.645.964.1 rupiah.

1.2 Rumusan Masalah

Kemiskinan pada Provinsi Jawa Tengah mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi semakin tinggi nya tingkat kemiskinan dan presentase penduduk miskin, salah satunya adalah upah minimum, tingkat PDRB, dan tingkat pendidikan yang berlaku pada setiap kabupaten di Jawa Tengah. Selama periode 2017-2022 tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah terdapat 5 (lima) Kabupaten yang memiliki tingkat penduduk miskin dan presentase penduduk miskin terbanyak, di antara nya adalah Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pemasang, dan Kabupaten Pemasang.

Pemerintah telah memberikan banyak cara pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, terbukti dengan adanya tingkat PDRB yang terus menerus meningkat, pendidikan setiap tahunnya yang lebih baik meningkat dari awalnya lebih banyak riwayat pendidikan SMP beralih menjadi lebih banyak tamatan SMA, upah yang terus meningkat pada setiap tahunnya. Namun tidak ada hasil yang baik untuk pengentasan kemiskinan, masyarakat miskin masih tergolong banyak pada setiap Kabupaten di Jawa Tengah, pada penelitian ini mencoba menganalisis seberapa besar pengaruh upah minimum, tingkat pendidikan, dan PDRB terhadap kemiskinan di Jawa

Tengah. Atas dasar permasalahan dari latar belakang diatas maka timbul permasalahan dan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh tingkat PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh variabel upah minimum, tingkat pendidikan, dan PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk menganalisis upah minimum, tingkat pendidikan, dan PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak:

1. Bagi pemerintah di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta pembanding untuk pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, terkhususnya Provinsi Jawa tengah.
2. Bagi Mahasiswa Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan literasi dan referensi terkait pembahasan tentang Kemiskinan, Pengangguran, Tingkat Upah Minimum, dan Tingkat Pendidikan.
3. Bagi Universitas Di harapkan hasil penelitian ini berdampak baik terhadap pertumbuhan Universitas Amikom Yogyakarta kedepan nya.

